



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KONTROVERSI RELAKSASI EKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA

T. Ade Surya

Analisis Legislatif Ahli Muda
teuku.surya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah memutuskan untuk memberikan perpanjangan izin (relaksasi) ekspor konsentrat tembaga kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), sampai dengan bulan Mei 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyatakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga kepada PTFI dan AMNT, yaitu *pertama*, kegiatan pembangunan smelter yang terhambat akibat pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat selesai tepat waktu. *Kedua*, komitmen PTFI dan AMNT untuk menyelesaikan pembangunan smelternya yang saat ini progres keduanya sudah mencapai sekitar 60%, dengan tenggat waktu sampai pertengahan tahun depan. *Ketiga*, produktivitas tenaga kerja yang akan terdampak jika operasional bisnis terhambat akibat pelarangan ekspor karena smelter belum selesai terbangun. *Terakhir*, kepemilikan saham pemerintah yang mayoritas di PTFI sehingga dinilai terlalu berisiko untuk keuangan negara. Kementerian ESDM pun akan segera menyiapkan Peraturan Menteri sebagai payung hukum atas kebijakan relaksasi ekspor tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa aturan relaksasi ekspor dan kewajiban kontraktor di dalamnya.

Namun, kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini menjadi kontroversi, karena berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pelarangan ekspor mineral mentah harus sudah mulai diberlakukan pada 10 Juni 2023. Terlebih, payung hukum untuk relaksasi ekspor konsentrat tembaga dengan menggunakan Peraturan Menteri seharusnya tidak dapat membatalkan pelarangan ekspor mineral mentah yang diamanatkan UU Minerba. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhy, menilai bahwa kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga akan menjadi kebijakan yang diskriminatif terhadap mineral mentah lainnya seperti bijih nikel, yang telah diwajibkan untuk dilakukan peningkatan nilai tambah terlebih dahulu (hilirisasi) di dalam negeri sebelum diekspor. Jika pengusaha mineral mentah lainnya menuntut hal yang sama dan disetujui maka akan sangat kontradiktif dengan upaya hilirisasi mineral yang tengah berjalan.

Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga juga dinilai sebagai preseden yang buruk dan indikasi inkonsistensi peraturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Direktur Eksekutif Center on Economics, Mohammad Faisal, menilai kebijakan relaksasi ekspor ini akan memberi dampak negatif terhadap iklim investasi. Penerapan aturan yang tidak konsisten akan mengganggu iklim investasi. Pemerintah telah beberapa kali memberikan relaksasi khususnya kepada PTFI, namun pembangunan smelternya yang telah dimulai jauh sebelum pandemi tidak kunjung selesai. perusahaan-perusahaan atau investor kecil justru lebih berkomitmen melakukan hilirisasi mineral. Selain mengganggu iklim investasi, relaksasi ekspor juga dinilai memberikan dampak pada pasokan bahan baku ke depannya.

Langkah pemerintah memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga tentu kontradiktif dengan upaya mendorong hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah. Keuntungan dari kebijakan relaksasi ekspor hanya bersifat jangka pendek, sedangkan peningkatan nilai tambah mineral mentah dengan hilirisasi di dalam negeri sebelum diekspor akan memberi manfaat besar dalam jangka panjang.

Atensi DPR

Keputusan pemerintah memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga kepada PTFI dan AMNT menjadi kontradiktif dengan upayanya mendorong peningkatan nilai tambah mineral mentah dengan hilirisasi di dalam negeri sebelum diekspor. Kebijakan ini juga menjadi kebijakan yang diskriminatif terhadap mineral mentah lainnya dan menunjukkan inkonsistensi penerapan aturan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi. DPR RI khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi perlu meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan lengkap terkait kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini karena bertentangan dengan UU Minerba. Komisi VII DPR RI juga perlu terus mendorong pemerintah untuk memantau seluruh pembangunan smelter dan memastikan pembangunannya dapat selesai sesuai jadwal sehingga program hilirisasi mineral dapat berjalan dengan baik.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 10 Mei 2023;
money.kompas.com, 6 Mei 2023; dan
ruangenergi.com, 16 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.